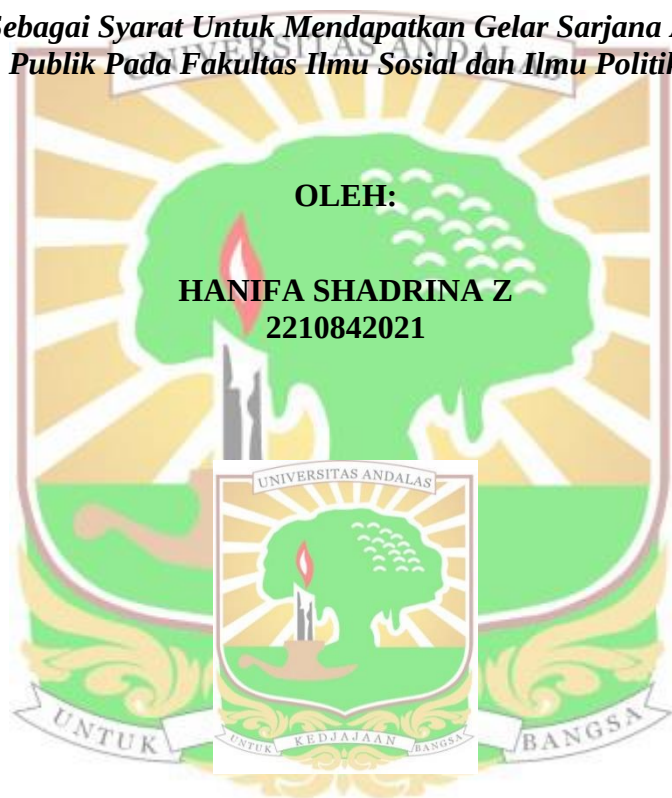


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI
PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS HUTAN
NAGARI SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Hanifa Shadrina Z, NIM 2210842021, Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman), Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2026. Dibimbing Oleh: Roza Liesmana, S.IP, M.Si dan Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 181 halaman dengan referensi 11 buku, 6 artikel, 4 dokumen dan 6 website.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat studi kasus pada Hutan Nagari Sungai Buluh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya target perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat dan tidak aktifnya kegiatan perhutanan sosial di Hutan Nagari Sungai Buluh. Hadirnya perhutanan sosial bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola Kawasan hutan secara legal dan sah. Oleh karena itu, pentingnya kajian implementasi kebijakan publik untuk menganalisis penghambat dan pendukung kebijakan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perhutanan sosial (studi kasus Hutan Nagari sungai buluh) belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala. Variabel ukuran dan tujuan, pada indikator keadilan masih belum maksimal ditunjukkan dengan masih ada masyarakat yang tidak tahu dan tidak mendapatkan sosialisasi perhutanan sosial. Variabel sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial belum mencukupi dan memadai. Selain itu, sumber daya sarana dan prasarana masih belum memadai. Variabel karakteristik organisasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Variabel komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksana belum berjalan dengan baik, terkendalanya komunikasi karna masyarakat yang belum paham tentang perhutanan sosial. Sementara itu, indikator koordinasi berjalan dengan baik. Variabel sikap para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Terkait variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik, pada indikator kondisi sosial, berjalan baik karena masyarakat memberi respon yang positif. Pada indikator ekonomi, belum berjalan maksimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pada indikator kondisi politik juga belum berjalan dengan baik karena tidak adanya dukungan pemerintah Nagari Sungai Buluh.

Kata Kunci: Implementasi, Perhutanan Sosial, Hutan Nagari Sungai Buluh

ABSTRACT

Hanifa Shadrina Z, 2210842021, Implementation of the Social Forestry Policies in West Sumatra Province (Case Study of Sungai Buluh Nagari Forest, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency), Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2026. Supervised by: Roza Liesmana, S.IP, M.Si and Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP. This research consists of 181 pages with references from 11 books, 6 articles, 4 documents, and 6 websites.

This study aims to analyze and describe the implementation of social forestry policies in West Sumatra Province, with a case study on Nagari Sungai Buluh Forest. This research is motivated by the fact that the social forestry targets in West Sumatra Province have not yet been achieved and the social forestry activities in Nagari Sungai Buluh Forest are inactive. The presence of social forestry aims to provide space for communities to manage forest areas legally and legitimately. Therefore, it is important to conduct a study on public policy implementation to analyze the obstacles and supporting factors of the policy.

This study uses the implementation theory framework by Van Meter and Van Horn with six variables, namely the variables of size and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, communication between organizations and implementing activities, implementers' attitudes, and the conditions of the social, economic, and political environment.

The results show that the implementation of the Social Forestry policy in the Sungai Buluh Nagari Forest is not yet optimal due to several obstacles. The standards and objectives of the policy have not been fully achieved, as some community members are still unaware of this program. Human resources, finances, and infrastructure are still lacking. The organizational characteristics have been functioning effectively. Communication between organizations is limited by the community's minimal understanding of Social Forestry, although coordination among implementers has been effective. The attitudes of the implementers support the policy implementation. Regarding environmental conditions, the social aspect is fairly supportive due to positive responses from the community, while the economic aspect is limited by budget efficiency policies, and the political aspect is constrained by minimal support from the Sungai Buluh Nagari Government.

Keywords: Implementation, Social Forestry, Sungai Buluh Nagari Forest